

HASIL PENELITIAN

PENGARUH KEPATUHAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN, PELATIHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN BPPMPV KPTK DENGAN RISIKO KECURANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Disusun dan Diajukan Oleh :

HERU ARIWIBOWO



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HASIL PENELITIAN

PENGARUH KEPATUHAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN, PELATIHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN BPPMPV KPTK DENGAN RISIKO KECURANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Disusun dan diajukan oleh :

**HERU ARIWIBOWO
A012221030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH KEPATUHAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN, PELATIHAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP KREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN
BPPMPV KPTK DENGAN RISIKO KECURANGAN
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Disusun dan diajukan oleh:

HERU ARIWIBOWO
NIM A012221030

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **12 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

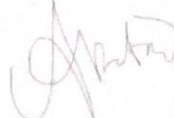
Menyetujui,

Pembimbing Utama



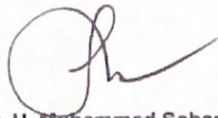
Andi Aswan, SE., MBA, M.Phil., DBA
NIP 197705102006041003

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si.
NIP 197209212006042001

Ketua Program Studi
Magister Manajemen



Dr. H. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.Si.
NIP 196806291994031002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir., S.E., M.Si., CIPM.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heru Ariwibowo
NIM : A012221030
Program studi : Magister Manajemen
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Pengaruh Kepatuhan Standar Pelaporan Keuangan, Pelatihan Dan Pengawasan Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan BPPMPV KPTK Dengan Risiko Kecurangan Sebagai Variabel Intervening**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 20 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Heru Ariwibowo

HASIL PENELITIAN

**PENGARUH KEPATUHAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN,
PELATIHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KREDIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN BPPMPV KPTK DENGAN RISIKO KECURANGAN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

Disusun dan Diajukan Oleh

Heru Ariwibowo
A012221030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, Juni 2024
Menyetujui
Tim Pembimbing

Ketua,



Andi Aswan, SE.,MBA.,M.Phil., DBA
NIP 197705102006041003

Anggota,



Dr. Hj. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si
NIP 197209212006042001

Ketua Program Studi Megister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H.M Sobarsyah, SE., M.Si., CPM
NIP 196806291994031002

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.2 Tinjauan Empiris.....	35
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	38
3.1. Kerangka Konseptual/Pemikiran.....	39
3.2. Hipotesis.....	39
BAB IV METODE PENELITIAN	43
4.1 Rancangan Penelitian	43
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
4.5. Metode Pengumpulan Data	46
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	46
4.7 Instrument Penelitian.....	48
4.8 Teknik Analisis Data.....	49
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Laporan Anggaran Kinerja 2022.....	6
2.1 Tinjauan Empiris	35
4.1 Definisi Operasional	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1 Kerangka Konseptual	39
5.1 Uji Heteroskedastisitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi bagi pemerintah untuk memberikan informasi kinerja keuangan bagi pihak internal maupun eksternal (Sholohah et al., 2019). Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas menjamin para pengguna laporan keuangan dalam mengambil dan menentukan keputusan yang tepat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan aktivitas dan pengelolaan dana juga kinerja dari pemerintah, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersusun dan tersaji sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu laporan keuangan yang berkualitas bukan saja hanya berorientasi pada luaran melainkan juga pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga dari kegiatan yang terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan bebas dari penyelewengan pun menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pada kenyataannya, temuan di lapangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan akan Peraturan UndangUndang masih banyak jumlahnya bahkan meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina dan Rasdianto, 2013:21). Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material serta dapat diandalkan

sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan menghasilkan laporan keuangan yang kredibel.

Kredibilitas laporan keuangan merupakan suatu kondisi di mana laporan keuangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kredibilitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Kredibilitas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan berbagai kriteria, antara lain:

1. Reliabilitas: Laporan keuangan harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas.
2. Kelengkapan: Laporan keuangan harus menyajikan semua informasi yang material dan relevan untuk pengguna laporan keuangan.
3. Kejelasan: Laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
4. Ketepatan waktu: Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Olivia (2022) .

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. PABU memberikan pedoman bagi entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibahas pada penelitian ini, Hal pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2015) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu,

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Faktor kedua adalah pelatihan. Pelatihan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas pelatihan juga merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sebuah keandalan laporan keuangan harus diperiksa dan dibuat oleh orang yang berkompeten agar bisa menyajikan sebuah laporan keuangan secara jujur dan wajar. Oleh karena itu sangat perlu diadakan suatu pelatihan keuangan yang memadai.

Faktor Ketiga adalah pengawasan. Pengawasan keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Agar menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan oleh pengguna, serta bersesuaian dengan konsep yang telah ditentukan pastinya dibutuhkan adanya pengawasan keuangan daerah. Untuk faktor selanjutnya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menyajikan deskripsi yang lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah, mengungkapkan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya, bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai, serta dapat meningkatkan daya pengelolaan anggaran, asset, dan kewajiban pemerintah Noviryantini (2020).

Pengawasan merupakan upaya sistematis dalam penetapan standar kinerja, untuk membandingkan standar kinerja yang sudah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya, sebagai sarana untuk mendeteksi apakah terjadi suatu distorsi, dan ditujukan memastikan bahwa sumber daya pemerintahan telah dipergunakan secara efektif dan seefisien mungkin, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Berdasarkan teori stewardshipi dimana pemerintah daerah (steward) berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada masyarakat (principal) berupa laporan keuangan yang andal. Dalam usaha terwujudnya suatu laporan keuangan yang dapat diandalkan diperlukan adanya pengawasan keuangan yang memadai. Dalam konteks laporan keuangan, pengawasan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini akan berdampak pada laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjamin kelengkapan dan ketepatan laporan keuangan. Pengawasan dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara lengkap dan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
3. Meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan telah melalui proses pengawasan yang efektif akan lebih dipercaya oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, dan

pemerintah. Hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Jatmiko (2020).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan mengambil keputusan, investor untuk menilai kinerja perusahaan dan memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, Teknologi Informasi dan komunikasi. Banyaknya kegiatan dan unit kerja yang dinaungi oleh BPPMPV KPTK mengharuskan memiliki laporan keuangan yang berkualitas karena setiap anggaran perlu dicatat dengan benar dan transparan sehingga *cash flow* dari BPPMPV KPTK terorganisir dengan baik.

Pengelolaan keuangan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) masih belum optimal terdapat indikasi bahwa manajemen keuangan belum sesuai dengan target beberapa kegiatan atau target anggaran tidak tersalurkan dengan baik sehingga membutuhkan evaluasi kinerja melalui beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan manajemen keuangan.

Tabel 1.1 Laporan Anggaran Kinerja 2022

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 7.510.623.000
2	4621	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 19.526.279.000
Total			Rp. 27.036.902.000

Sumber : BPPMPV KPTK

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui terdapat dua kegiatan dalam alokasi anggaran yang pertama BPPMPV KPTK tahun 2022. Yang pertama kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mendapatkan biaya sebesar Rp. 7.510.623.000 dan yang kedua kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi yang mendapatkan biaya 19.526.279.000. sehingga total anggaran BPPMPV KPTK tahun 2022 mencapai Rp. 27.036.902.000.

Berdasarkan hasil audit BPKP atas laporan keuangan BPPMPV KPTK tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan, Penetapan pagu anggaran tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai. Revisi anggaran tidak dilakukan secara tertib dan transparan. Dalam penatausahaan keuangan Pencatatan transaksi keuangan tidak dilakukan secara real time, Rekonsiliasi bank tidak dilakukan secara berkala serta Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak dilakukan secara tertib dan transparan.

Sehingga BPPMPV KPTK perlu menindaklanjuti temuan BPKP dengan melakukan perbaikan sistem pengendalian intern, penyelesaian temuan penyimpangan keuangan, dan peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset. BPPMPV KPTK juga perlu berkomitmen untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga terhindar dari risiko kecurangan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan, pelatihan pelaporan keuangan, dan pengawasan pelaporan keuangan terhadap kredibilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengkaji beberapa aspek guna mengetahui pengaruhnya terhadap kredibilitas laporan keuangan maka adapun judul pada penelitian ini adalah Pengaruh Kepatuhan Standar Pelaporan Keuangan, Pelatihan Dan Pengawasan Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK)?
2. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK)?

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK)?
4. Apakah kepatuhan, pelatihan dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pelatihan terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) ?
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK).
4. Untuk Mengetahui pengaruh kepatuhan, pelatihan dan pengawasan secara simultan terhadap kredibilitas laporan keuangan Pada Kantor Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPMPV KPTK).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur manajemen, khususnya laporan keuangan dalam hal pengaruh. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan kinerja karyawan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya bersifat melengkapi maupun melanjutkan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini nantinya tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis berupa penambahan wawasan berkaitan dengan pengaruh manajemen keuangan yang dibahas berkaitan dengan kepatuhan, pelatihan dan pengawasan. Tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa memberikan solusi bagi perusahaan atau organisasi untuk mengatasi permasalahan pelaporan keuangan dan sebagai petunjuk perusahaan atau organisasi agar terus meningkatkan kinerja karyawan di masa yang akan datang dan di kondisi yang berubah-ubah.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris kepada pihak terkait sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan, serta tinjauan empiris.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, penjelasan terkait populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, analisis dan teknik pengolahan data, serta definisi operasional variabel.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penguraian deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai penyajian hasil pengolahan data yang berbentuk tabel dan deskripsi hasil penelitian. Bab ini juga menguraikan pembahasan atas hasil penelitian di mana akan dihubungkan dengan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori yang mendukungnya.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Bab ini menjadi uraian terakhir dari tesis dan dapat menjadi penuntun bagi peneliti selanjutnya dengan adanya implikasi penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Tinjauan teori dan konsep adalah bagian dari suatu penelitian atau kajian yang berfungsi untuk menyediakan landasan teoritis dan pemahaman konseptual terhadap topik atau masalah yang akan diteliti. Secara umum, tinjauan teori dan konsep memiliki beberapa tujuan utama, antara lain, Memberikan Dasar Teoritis Mengidentifikasi Kesenjangan Pengetahuan, Merumuskan Hipotesis atau Kerangka Kerja Konseptual dan Mengarahkan Metode Penelitian. adapun uraian tinjauan teori dan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar Akuntansi Keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar. Kerangka dasar dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam

mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI:2016).

2.1.1.1 Pengertian Laporan keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2017:1) Laporan keuangan adalah penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI; 2016) :

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk Catatan atas Laporan Keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset neto suatu organisasi.
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto.

- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
- d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- e. Usaha jasa suatu organisasi.

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo;2009) :

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi

sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi
7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.1.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan paraanggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan Hendrawan (2011).

2.1.1.4 Tujuan PSAK No. 45

Bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Gultom (2016).

2.1.1.5 Ruang Lingkup

PSAK No. 45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh

entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau di tebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Setiadi (2021).

PSAK No. 45 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya.

Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

2.1.1.6 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- 1) kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan
- 2) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban dan aset neto.

b) Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- 1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto,
- 2) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain,
- 3) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk:
 - (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,

(b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlabadan memberikan jasa.

(c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

c) Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut.

1) Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah sebagai berikut.

- a) Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan aktivitas).
- b) Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun.
- c) Perubahan pada *account* piutang lembaga.
- d) *Account* (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya dibayar di muka dan lain-lain.

2) Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aset tetap, penempatan/pencairan

dana deposito atau investasi lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- a) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
- b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.

3) Aktivitas Pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aset neto dari surplus-defisit lembaga.

a) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

Catatan atas Laporan Keuangan dapat berupa:

- 1) Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aset tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk pencadangannya. (IAI, 2016).

2.1.1.7 Pernyataan PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh

organisasi nirlaba. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan atau keuntungan komersial.

Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas. Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggung jawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan Laporan Aktivitas.

Terikat dengan misi entitas, maka pendapatan utama disajikan bruto, sedang pendapatan investasi disajikan secara neto setelah dikurangi beban investasi. Informasi tercapainya program amat penting dalam laporan keuangan, yang menggambarkan efektivitas beban dan manfaat yang dirasakan penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat penting menggambarkan kualitas prrtanggungjawaban manajemen keuangan di mata para donatur.

Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu dipaparkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang memberi harkat khusus CALK dalam laporan keuangan nirlaba setaradengan Neraca dan Laporan Kegiatan. Satria (2018).

2.1.2 Pelatihan

2.1.2.1 Pengertian Pelatihan

Menurut Wahyuningsih (2019), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar.

Menurut Iriawan (2021), pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Rivai dan Sagala (2011:212), pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

Dari beberapa pengertian diatas, pelatihan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian dan pengetahuan karyawan guna melaksanakan pekerjaan secara efektifitas dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Pelatihan

Menurut Carrel dalam Salinding (2011:15) mengemukakan delapan tujuan utama program pelatihan antara lain:

1. Memperbaiki kinerja
2. Meningkatkan keterampilan karyawan
3. Menghindari keusangan manajerial
4. Memecahkan permasalahan

5. Orientasi karyawan baru
6. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial
7. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel
8. Bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran dari pada pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai.

Menurut Widodo (2015:84), mengemukakan bahwa tujuan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kedaluarsa kemampuan dan pengetahuan personel, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian personel. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.

2.1.2.3 Manfaat Pelatihan

Menurut Rivai dan Sagala (2011:217), adapun manfaat pelatihan yang dibagikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Manfaat untuk karyawan
 - a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
 - b. Melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan, pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan.
 - c. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya

diri.

- d. Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustrasi, dan konflik.
 - e. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap.
 - f. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan.
 - g. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan keterampilan interaksi.
 - h. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatihan.
 - i. Memberikan nasehat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan
 - j. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan
 - k. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis dengan latihan .
 - l. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru.
2. Manfaat untuk perusahaan
- a. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit.
 - b. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan
 - c. Memperbaiki sumber daya manusia
 - d. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan.
 - e. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik.
 - f. Mendukung otentitas, keterbukaan dan kepercayaan
 - g. Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan
 - h. Membantu pengembangan perusahaan
 - i. Belajar dari peserta
 - j. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan.
 - k. Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan dimasa depan

- l. Perusahaan dapat membuat keputusan dan memecahkan masalah yang lebih efektif
 - m. Membantu pengembangan promosi dari dalam
 - n. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan motivasi, kesetiaan, sikap dan aspek yang biasanya diperlihatkan pekerjaan.
 - o. Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas kerja
 - p. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, dan administrasi
 - q. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan
 - r. Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen
 - s. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal
 - t. Mendorong mengurangi perilaku merugikan
 - u. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan
 - v. Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan
 - w. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stress dan tekanan kerja. Siregar (2021)
3. Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan antargrup dan individu.
- a. Meningkatkan komunikasi antar group dan individual
 - b. Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi
 - c. Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif
 - d. Memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan kebijakan internasional
 - e. Meningkatkan keterampilan interpersonal

- f. Membuat kebijakan perusahaan , aturan dan regulasi
- g. Meningkatkan kualitas moral
- h. Membangun kohesivitas dalam kelompok
- i. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dankoordinasi
- j. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untukbekerja dan hidup

2.1.2.4 Jenis-jenis Pelatihan

Setiap pendidikan dan pelatihan yang akan diadakan harus selalu memperhatikan sejauh mana pola pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dapat menjamin proses belajar yang efektif. Menurut Widodo (2015:86), jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan dalam organisasi antara lain:

1. Pelatihan dalam kerja (on the job training)
2. Magang (apprenticeship)
3. Pelatihan di luar kerja (of-the-job training)
4. Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya (vestibule training)
5. Simulasi kerja (job simulation)

2.1.2.5 Sasaran Pelatihan

Sebelum mengenal pelatihan kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa sasaran pelatihan. Menurut Sutrisno (2012:69), mengemukakan enan sasaran pelatihan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas kerja
2. Meningkatkan mutu kerja
3. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia
4. Meningkatkan moral kerja

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan
6. Menunjang pertumbuhan pribadi

2.1.2.6 Syarat-syarat Pelatihan

Menurut Hasibuan (2016:74), pelatihan atau instruktur yang baik hendaknya memiliki syarat sebagai berikut:

1. Teaching Skills

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk Mendidik atau mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer pengetahuannya kepada peserta pengembangan.

2. Communication Skills

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara efektif.

3. Personality Authority

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pengembangan.

4. Social Skills

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan.

5. Technical Competent

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoretis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan.

6. Stabilitas Emosi

Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak pendendam serta memberikan nilai yang objektif.

2.1.2.7 Dimensi-dimensi Program Pelatihan

Menurut Wahyuningsih (2019) dimensi program pelatihan yang efektif yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapat diukur melalui:

1. Materi Pelatihan (Isi Pelatihan) yaitu, apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan itu *up to date*.
2. Metode Pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan telah sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta pelatihan.
3. Sikap dan Keterampilan Instruktur/Pelatih, apakah instruktur mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong orang untuk belajar.
4. Lama Waktu Pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi tersebut.
5. Fasilitas Pelatihan, apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan dan apakah makananya memuaskan.

2.1.3 Pengawasan

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Halim dan Iqbal, (2017:37):

“Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Sedangkan menurut Sonny (2010) mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar

penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan”. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sondang P. Siagian (2014:213) mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.

Saydam (2015:187) menjelaskan sebagai berikut:

“Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

2.1.3.2 Manfaat dan Keuntungan Pengawasan

Menurut Harahap (2013:313-315) yang mengemukakan apabila sistem pengawasan kerja itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar pengawasan dan metode yang sesuai maka diperoleh berbagai manfaat atau keuntungan antara lain:

1. Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah.
2. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan.
3. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.
4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab.
5. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Dalam Proses Pengawasan

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna(2014:112). Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of controlresponsbillity*)
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizationalsuitabillity*)
8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality ofcontrol*)
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)
11. Prinsip Kekecualian (*The expectation Primciple*)
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)

14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Menurut Maku (2017) adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*). Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*). Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*). Tekhmik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan

bawahnya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.

8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Prinsip Kekecualian (*The expectation Principle*). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan- penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan Directing.

2.1.3.4 Fungsi Pengawasan Keuangan

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

Menurut Pedansa (2013) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi:

“Pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindatanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi

penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan”.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pada pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD.

2.1.3.5 Karakteristik Pengawasan Keuangan

Mulyasa (2022) mengemukakan secara umum terdapat Sembilan karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu:

1. Akurat (*Accurate*)
2. Tepat waktu (*Timely*)
3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)
4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategiccontrol points*)
5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
6. Secara organisasi realistik (*Organizationally realistic*)
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated withthe organization's work flow*)

8. Fleksibel (*Flexible*)
9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Adapun penjelasan dari karakteristik-karakteristik pengawasan keuangan diatas adalah sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2. Tepat waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi diantara para karyawan.

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan

perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistic. Perbedaan status di antara individu harus dihargai juga.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya

8. Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*) Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi,

pengendalian tersebut harus berhubungan dengan tujuan dan prinsip yang berarti sehingga dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Dengan diterimanya sistem pengendalian, maka setiap anggota akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ermawati dkk (2020)	Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii)	1. Secara parsial kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan kualitas audit yang baik, karena sebagian besar perusahaan berafiliasi dengan KAP bigfour. KAP bigfour merupakan auditor eksternal yang memiliki reputasi baik

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>dimata para klien. Sehingga perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan kredibel, jika laporan keuangan perusahaan baik maka ini memberi sinyal positif kepada para investor untuk mengambil keputusan</p> <p>2. Secara parsial komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah anggota komite audit tidak selalu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komite audit merupakan pihak internal perusahaan sehingga beberapa investor kurang percaya jika komite audit mengaudit laporan keuangan sendiri tanpa diaudit oleh pihak eksternal.</p>
2.	Utami dkk (2023)	Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal memiliki peran positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Semakin banyak auditor internal terlibat dalam memantau keandalan pelaporan keuangan, semakin baik kualitas pelaporan keuangan.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
3.	Hardiningsih (2010)	Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	independen ternyata juga belum bisa berperan dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan penempatan dewan komisaris hanya sekedar memenuhi regulasi, sehingga belum bisa menegakkan Good Corporate Governance. Dalam hal kualitas audit ternyata hanya berkisar 40% perusahaan yang menggunakan auditor spesialis industri. Sehingga kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran sangat tergantung pada kemampuan teknikal auditor.
4.	Rahmayanti (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Skpd Kabupaten Klaten)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengendalian internal, akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Untuk pengujian dengan model Moderate Regression Analysis (MRA) diperoleh hasil bahwa komitmen pimpinan memoderasi variabel akuntabilitas, dan ketidakpastian lingkungan,

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			tetapi komitmen pimpinan tidak . memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan
5.	Jannah (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Dampak praktis yang signifikan dari penelitian ini berhubungan dengan pemerintah daerah. Yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah mengenai keahlian sumber daya manusia dan keunggulan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan keahlian sumber daya manusia akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan keahlian pegawai yang terlibat dalam pelaporan keuangan, seperti melalui workshop, bimbingan teknis, pemberian modul, dan asesmen, sejalan dengan temuan penelitian ini.

Sumber: Hasil *Research* Peneliti

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

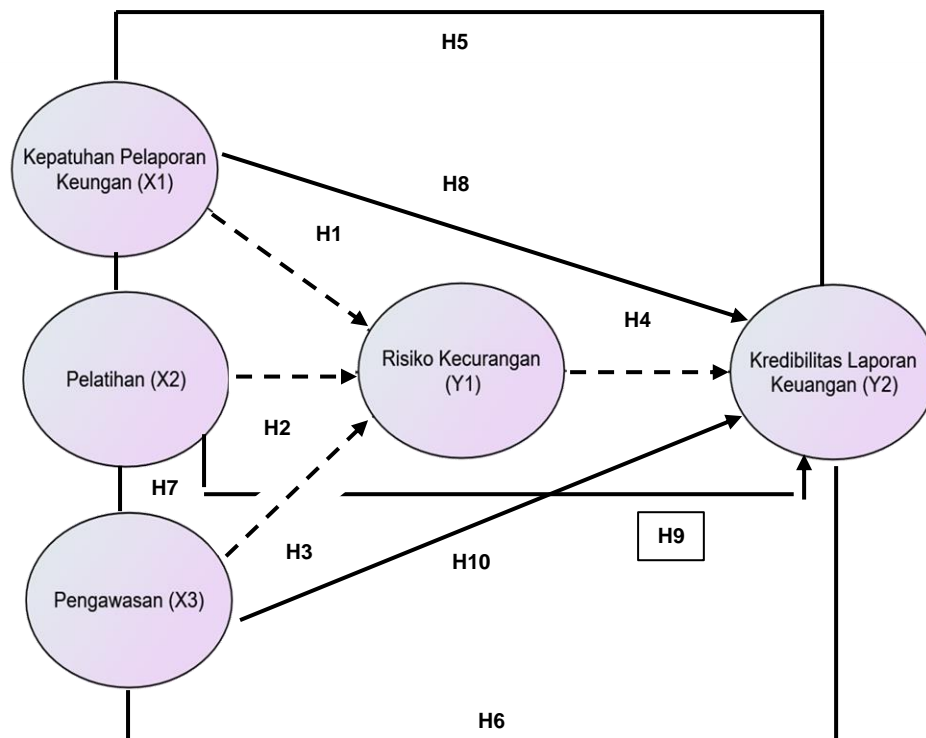
3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah sebuah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui sebuah penelitian. Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai instrumen agar dapat menjabarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dengan menggunakan konsep *supply and demand reduction* dan konsep kejahatan transnasional

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995:39).

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kredibilitas laporan keuangan merupakan suatu kondisi di mana laporan keuangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kredibilitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan Pengawasan terhadap kegiatan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh kepatuhan, pelatihan dan pengawasan terhadap kredibiitas laporan keuangan. Adapun kerangka konspetual dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
(Sumber: Hasil Olah Peneliti)

Catatan :

- Hubungan langsung : _____
- Hubungan Tidak langsung : - - - - -

3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati atau diuji secara empiris (Kuncoro, 2013:59).

1. Pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Risiko Kecurangan

Kepatuhan laporan keuangan adalah suatu kondisi di mana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kepatuhan laporan keuangan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan audit.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amalia (2019) Menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap risiko kecurangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kepatuhan terhadap SAK dan risiko kecurangan. Semakin tinggi kepatuhan terhadap SAK, semakin rendah risiko kecurangan yang terjadi. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepatuhan Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredibilitas laporan keuangan

2. Pengaruh Pelatihan terhadap Risiko Kecurangan

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Pelatihan dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau organisasi.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2018) judul Pengaruh Pelatihan Anti-Kecurangan dan Etika Profesi terhadap Risiko Kecurangan pada Perbankan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan anti-kecurangan dan etika profesi berpengaruh negatif terhadap risiko kecurangan. Semakin sering dan efektif pelatihan yang diberikan, semakin rendah risiko kecurangan

yang terjadi. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredibilitas laporan keuangan

3. Pengaruh Pengawasan terhadap Risiko Kecurangan

Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusuf (2014) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Risiko Kecurangan Akuntansi”. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pengawasan internal dan risiko kecurangan akuntansi. Artinya, semakin baik pengawasan internal, semakin rendah risiko kecurangan akuntansi. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredibilitas laporan keuangan

4. Pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan.

Kepatuhan laporan keuangan adalah suatu kondisi di mana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kepatuhan laporan keuangan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut

dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan audit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Narulita 2015 menemukan bahwa kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepatuhan Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredibilitas laporan keuangan

5. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kredibiitas Laporan Keuangan

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Pelatihan dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustofa dkk (2017) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi dan skala usaha berpengaruh signifikan terhadap kuitas penyajian laporan keuangan. Pemanfaataan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (variabel dependen). Besarnya nilai koefisien determinasi 0,491 berarti variabel pelatihan akuntansi, skala usaha, pemanfaatan informasi akuntansi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan sisanya sebesar 50,9% dijelaskan variabel lain yang tidak teliti. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan.

6. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan

Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Amriani (2018) dapat disimpulkan bahwa 1) Pengawasan intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar 2) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar 3) Penerapan akrual basis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Kep. Selayar. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan.

7. Pengaruh Risiko kecurangan terhadap kredibilitas laporan keuangan

Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya tindakan yang disengaja untuk menipu, memanipulasi, atau mencurangi suatu proses atau sistem untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Risiko ini dapat terjadi di berbagai organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Fitriani (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Risiko Kecurangan, Tata Kelola Perusahaan, dan

Mekanisme Pengendalian Internal terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa risiko kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap kredibilitas laporan keuangan. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H7 : Risiko kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan

8. Pengaruh Kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan melalui Risiko Kecurangan

Standar Laporan Keuangan (SAK) adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana informasi keuangan suatu entitas harus disajikan dan diukur. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Komprehensif, Andal, Relevan dan Dapat dibandingkan. Standar laporan keuangan memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana informasi keuangan harus disajikan dan dilaporkan. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan integritas data dalam laporan keuangan, mengurangi kemungkinan manipulasi atau distorsi informasi yang dapat terjadi dalam tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suciati (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Kepatuhan SAK terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Risiko Kecurangan dengan Pendekatan *Moderated Mediation*. Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan terhadap SAK berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan berpengaruh negatif terhadap risiko kecurangan. Ukuran perusahaan dan kompleksitas transaksi moderasi hubungan antara kepatuhan terhadap SAK dan kualitas laporan keuangan. Kualitas audit memediasi

hubungan antara kepatuhan terhadap SAK dan risiko kecurangan.

Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H8 : Risiko kecurangan mampu memediasi antara kepatuhan laporan keuangan dengan kredibilitas laporan keuangan.

9. Pengaruh Pelatihan terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan melalui Risiko Kecurangan

Pelatihan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Pelatihan merupakan salah satu alat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas organisasi, dan daya saing organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadirah (2020) dengan judul Pengaruh Pelatihan, Tunjangan Kinerja Dan Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Potensi Kecurangan Pegawai Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan manajemen risiko yang baik itu harus memastikan suatu organisasi mampu memberikan penanganan yang tepat terhadap risiko yang akan ada dan mempengaruhi system suatu organisasi. Informasi mengenai manajemen risiko berguna bagi para pemangku kepentingan, informasi ini digunakan untuk melakukan analisis risiko agar tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi. Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H9: Risiko kecurangan mampu memediasi antara pelatihan dengan kredibilitas laporan keuangan.

10. Pengaruh Pengawasan terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan melalui Risiko Kecurangan

Pengawasan keuangan adalah suatu proses sistematis untuk memastikan bahwa keuangan organisasi digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian widya 2021 Pengaruh Pengawasan Eksternal terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan Go Public di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan eksternal, dalam hal ini audit eksternal, berpengaruh positif terhadap kredibilitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin independen dan efektif audit eksternal, maka semakin tinggi kredibilitas laporan keuangan perusahaan Maka adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H10 : Risiko kecurangan mampu memediasi antara pengawasan dengan kredibilitas laporan keuangan.